



RENCANA KERJA  
TAHUN 2023



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai unit kerja untuk tahun 2023. Selain itu Renja ini disusun menyediakan rencana teknis 1 (satu) tahunan yang akan dijabarkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Periode Tahun 2021 –2026.

Malili, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Luwu Timur



S A T R I, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19641231 199011 1 005

---

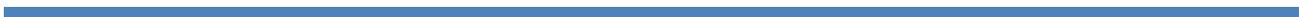
## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab. I	Pendahuluan..... 1
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 3
Bab. II	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu..... 6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... 6
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 17
2.4	Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 18
2.5	Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ... 26
Bab. III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... 27
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 27
3.2	Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah ..... 28
3.3	Program Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ..... 28
Bab. V	Penutup..... 42



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD ....	7
Tabel 2.2	Analisis Pencapaian Kinerja .....	15
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	19
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	29
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2023 .....	37



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis( Renstra ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta penyusunannya berpedoman pada RKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Undang-Undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD. kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## 1.2. Landasan Hukum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan Masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai tujuan Nasional Bangsa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditegaskan perlunya ditumbuhkan Budaya Gemar Baca melalui Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber Informasi berupa Karya Cetak, Karya Tulis atau Karya Rekam, mewajibkan Pemerintah Daerah menjaminketersediaan layanan perpustakaan secara merata, menjamin kelangsungan pemeliharaan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menggalakkan promosi Gemar Membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah dan menyelenggarakan serta mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan ke khasanah daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan daerah.

Demikian pula arsip memiliki arti strategis dalam kegiatan suatu organisasi pemerintahan maka pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian arsip dan dokumen vital serta penyelenggaraan kegiatan organisasi berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja buktihukum dan memori organisasi baik yang terekam dalam bentuk media kertas maupun audio visual perlu mendapat perhatian dan dukungan terutama kesiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional sehingga arsip dan dokumen vital dapat dilestarikan secara tertib dan aman sebagai bukti Autentik dan Yuridis bila suatu saat dibutuhkan baik sebagai bahan penelitian maupun sebagai buktiyuridis.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
2. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ); (Menunggu dari Kemendagri)

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  
  
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu

- Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69 );
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
  18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor ). (*Menunggu Penetapan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023*)

### 1.3 Maksud dan tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan, pembangunan, pengembangan pada bidang perpustakaan dan kearsipan selama satu tahun anggaranyaitu tahun anggaran 2023 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurunwaktu satu tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran maka Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 menjadi Pedoman untuk menyusun RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenLuwu Timur Tahun 2023.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja SKPD tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi objek permasalahan pengembangan perpustakaan dan kearsipan saat ini, Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahun 2023, maka evaluasi kinerja dilakukan dengan melihat realisasi 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020- 2021 dan target capaian tahun perencanaan yaitu tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja dimaksudkan agar dapat mengukur pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan demikian data dimaksud dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan  
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023  
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2022 (Renja OPD) Tahun n-1/
					Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD 2021	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
2.17. 2.17.01. 7	Program pengembangan budaya baca dan pembinaad perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun		8169	12000	12000	100%	12200
		Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		3473 3	24586	24586	100 %	25586
2.17. 2.17.01. 7 11	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah judul buku yang diadakan (judul)		100	796	968	100%	673
		Jumlah buku yang dilestarikan (eksamplar)		200	200	200	100%	200

					Jumlah Bahan Perustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	909					
2.17.	2.17.01.	7	12	Pekan Masyarakat Membaca	Jumlah kegiatan pengembangan minat baca yang dilaksanakan (kegiatan)		1	3	3	100%	3
	2.17.	2.17.01	7	Pemberiaan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah orang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24					24

2.17.	2.17.01	7	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Informasi Technology Service Management)	3					3
2.17.	2.17.01	7	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	3					3
2.17.	2.17.01	7	Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	1					1
2.17.	2.17.01	7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosia	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	10					10

2.17.	2.17.01.	Jumlah duta baca tingkat daerah/kabupaten kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6						6
-------	----------	--	---	--	--	--	--	--	---

2.17.01.	7	13	Layanan Pustaka dan Informasi/Layanan Sirkulasi	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling (kali)		260	200	260	87%	120
				Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah (pengunjung)		8169	12000	8169	100%	12200
2.17.	2.17.01.	7	14	Apresiasi Perpustakaan Desa dan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dinilai (perpustakaan)	22	22	22	100%	22
2.17.	2.17.01.	7	16	Pembinaan Perpustakaan pada satuan dasar	Jumlah perpustakaan binaan perpustakaan	20	20	20	100%	100
2.18.	2.17.01.	20		Program Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan	persentase perangkat daerah yang tertib arsip dinamis					100
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	6.500				6500
				Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil poengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	60				60
				Akuasisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan ajuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	1000				1000

2.18.	2.17.01.	20	1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Daerah	Jumlah pengelola kearsipan yang dikapasitasi		45	85	45	100%	100
					Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipaan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	2					2
2.18.	2.17.01.	20	2	Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah & Desa	Jumlah perangkat daerah yang dibina kearsipannya		25	35	25	100%	45
2.18.	2.17.01.		2		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	2000					2000
2.18.	2.17.01.		2		Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	2000					2000
2.18.	2.17.01.		2		Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	1					1
2.18.	2.17.01.		2		Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	20					20
2.18.	2.17.01.	20	4	Pengawasan Internal Kearsipan	Jumlah SKPD dan desa yang diawasi kearsipannya		30	38	30	100%	54
2.18.	2.17.01.	21		Program Peningkatan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Persentase dokumen arsip yang terdata dan tertata secara akurat						
2.18.	2.17.01.	21	1	Pengelolaan Database Kearsipan	Jumlah data arsip yang dikelola		8812	6000	8812	100%	6500

2.18.	2.17.01.	21	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	0	0	0	0	0	0
-------	----------	----	---	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

2.18.	2.17.01.	21	3	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah arsip yang dialihmediakan	0	20	0	0	0	0
2.17	2.17.01.	1		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi						
2.17	2.17.01.	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar (surat)		382	500	867	100 %	600
					Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	4					
2.17	2.17.01.	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang terbayar (rekening)	0	36	36	36	100%	180
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4					
2.17	2.17.01.	1	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	2	2	2	100%	8
2.17	2.17.01.	1	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki (unit)	33	39	38	38	100%	181
2.17	2.17.01.	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)		39	39	39	100%	78
2.17	2.17.01.	1	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	10	8	8	100%	8

2.17	2.17.01.	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik yg tersedia	1	6	6	6	100%	6
2.17	2.17.01.	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)		168 0	850	974	100%	850
2.17	2.17.01.	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia (eksamplar)	0	60	60	60	100%	60
					Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1					1
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	4					4

2.17	2.17.01.	1	14	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD	Jumlah hari kegiatan pameran yang dilakukan (hari)	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.01.	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi						
2.17	2.17.01.	2	3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	23	1	9	9	100%	279
2.17	2.17.01.	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara (unit)	2	2	2	2	100%	2
2.17	2.17.01.	2	6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara (unit)	6	5	6	6	100%	6
2.17	2.17.01.	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya						

2.17	2.17.01.	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	0						
2.17	2.17.01.	5	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun (dokumen)	18	2	0	0	0		2
2.17	2.17.01.	5	2	Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (dok)	0	1	1	1	100%		1
2.17	2.17.01.	6		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3						3
2.17	2.17.01.	6	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	3	7	7	7	100%		3

Pada evaluasi tersebut diatas, dapat dijabarkan program kegiatan yang memiliki tingkat capaian yang sesuai dengan target perencanaandan yang kurang dari target begitu juga dengan yang melebihi target kinerja, sebagaimana penjelasan berikut :

- ❖ Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tabel 2.1 di atas, dapat dilihat beberapa kegiatan yang pada tahun 2020 tidak tercantum target dan realisasi karena refofusinganggaran terkait Pandemi Covid-19, kegiatan dimaksud, antara lain:

#### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 tidak memenuhi target karena Covid 19 sehingga surat masuk dan keluar tidak memenuhi target yangtelah ditetapkan. Target 500 surat masuk dan keluar hanya terealisasi 382 Surat.

Capaian renstra sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 76,4% dari target kinerja renstra 500 surat dengan perkiraan sebanyak500 pada tahun 2021.

Untuk kegiatan ini akan tetap menyediakan 500 surat masuk dan keluar untuk tahun 2021.

2. Kunjungan kerja dalam daerah

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 tidak memenuhi target karena kurangnya kunjungan dalam daerah karena Covid-19.

Capaian renstra sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 76 % dari target kinerja renstra 289 kali dengan

perkiraan realisasi 289 dari tahun tersebut, kinerja tahun 2016 sampai 2020 ditambah dengan target kinerja direncanakan untuk tahun 2021

3. Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Kegiatan SKPD Pada kegiatan ini tidak terlaksana karena refofusing anggaran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini tidak terlaksana karena refofusing anggaran, namun dianggarkan kembali pada tahun 2021.

C. Program Peningkatan Sistem Informasi Kearsipan

Pada kegiatan ini tidak terlaksana karena refofusing anggaran.

❖ Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Pekan Masyarakat Membaca
2. Apresiasi Perpustakaan Desa dan Sekolah
3. Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
4. Layanan Pustaka dan Informasi/Layanan Sirkulasi

5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Daerah
6. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan Desa
7. Pengawasan internal kearsipan
8. Pengelolaan Data Base Kearsipan
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12. Penyediaan Alat Tulis Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
17. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis
18. Monitoring dan evaluasi
19. Kunjungan Kerja dalam Daerah

20. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
21. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
24. Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Tolak ukur Kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan
2. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan saran temu balik
3. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pengukur kinerja pelayanan dengan analisis target, capaian dan proyeksi tahun 2021 s/d tahun 2026, sebagai tabel berikut.

Table 2.2  
ANALISIS PENCAPAIAN  
KINERJA PELAYANAN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK/ (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI CAPAIAN		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11		14
1	Jumlah perpustakaan			336	336	336	336	336	337	337	338	338	338	Berdasarkan standar nasional perpustakaan, khusus perpustakaan kabupaten/ kota untuk kunjungan fisik per kapita per tahun sekurang-kurangnya 55 % dengan perhitungan jumlah kunjungan/ jumlah penduduk. Hal ini menuntut peningkatan minat baca masyarakat yaitu dengan mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan. Dengan demikian, melalui kegiatan pembinaan, dapat memotivasi desa untuk mengaktifkan perpustakaan di desa. Target yang ditetapkan tersebut berdasarkan dari data jumlah penduduk yang mana mengalami peningkatan tiap tahunnya.

2	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun			12000	12200	12500	15000	16000	12010	12205	12510	15010	16010	Target yang diberikan belum dapat memenuhi standar disebabkan perhatian masyarakat yang saat ini tertuju pada internet, media sosial dan gadget sehingga mengurangi minat baca khususnya terhadap buku. Namun untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat, diharapkan dapat didukung dengan kegiatan lomba-lomba minat baca yang diselenggarakan di perpustakaan daerah dan juga dengan diaktifkannya perpustakaan keliling di tempat-tempat keramaian atau fasilitas umum.
3	Jumlah Arsip aktif dan inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip			50	75	100	125	150	50	75	100	125	150	Pengelolaan dan penataan arsip dengan baik agar mudah diakses dan dipergunakan oleh yang berhak menggunakannya. Menata arsip yang baik bukan sekedar membuat daftar arsip guna penemuan kembali arsip, tetapi juga mengolah arsip menjadi informasi yang mencerminkan keberadaan, tugas dan fungsi pencipta arsip.
4	Nilai Akip			60	62	64	70	72	61	62	64	70	72	

a. Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar dalam rangka mencerdaskan dan memasyarakatkan minat dan budaya baca masyarakat, anak didik dilingkungan sekolah. Untuk Perpustakaan bisa berjalan secara optimal dilaksanakan melalui pelayanan, baik pelayanan publik maupun melalui pembinaan. Urusan perpustakaan dalam menyelenggarakan pembangunan menyelenggarakan satu Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Salah satu sub kegiatan yang bisa mensupport Visi Misi Kepala Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah dengan pengadaan buku-buku yang identic dengan kegiatan prioritas yang didukung dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur.

b. Pelayanan Kearsipan

Penyelenggaraan layanan Kearsipan merupakan layanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mengamankan arsip-arsip milik daerah baik dalam bentuk naskah naskah maupun dalam bentuk lainnya dalam keadaan tunggalmaupun kelompok.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kearsipan yang berkesinambungan dari tingkatbawah sampai tingkat atas dikeluarkanlah Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa/Kelurahan disamping Permendagri No. 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Dalam Negeri, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah KabupatenLuwu Timur Nomor 4 Tahun 2013.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur mengidentifikasi isu-isu penting terkait penyelenggaran

tugas dan fungsinya. Dan dari hasil identifikasi tersebut diharapkan mampu menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan kinerja dengan tepat dalam mengambil kebijakan.

Dengan seiring waktu, isu strategis dapat berubah. Dan dalam tahun rencana 2023 dapat diidentifikasi isu-isu sebagai berikut :

#### 1. ISU INTERNAL

##### a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang per 25000 penduduk kab/kota dan jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75000 penduduk. Berdasarkan Setelah evaluasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan mendapatkan capaian sebesar 111 %, namun sejauh ini hambatan yang paling kritis dialami adalah keterbatasan tenaga SDM,

1. Dalam pelaksanaan meningkatkan minat baca masyarakat, hambatan utama yang dihadapi adalah keberadaan internet dan media sosial yang sangat dekat keberadaannya dengan individu masyarakat dan sangat mudah untuk diakses dengan penggunaan gadget, smartphone, dan peralatan sejenisnya. Sedangkan untuk mewujudkan perangkat daerah dan desa yang tertib kearsipannya, terkendala dengan sarana dan prasarana khususnya di desa dan kurangnya perhatian dan pemahaman pengelola arsip pada perangkat daerah.
2. Pada visi dan misi kepala daerah, urusan perpustakaan dan kearsipan mendukung misi “Mendorong Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Dan untuk mewujudkan administrasi yang tertib, maka setiap perangkat daerah harus melaksanakan perbaikan sistem

kearsipannya masing-masing sesuai sasaran pertama yaitu “meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik”. Dan dengan memaksimalkan kualitas pelayanan perpustakaan, yang menunjang sasaran yang kedua yaitu “Meningkatkan kinerja pelayanan publik”.

3. Tantangan yang dihadapi adalah

- Paradigma “*paperless*” membuat lapisan masyarakat cenderung memilih dan mengandalkan system elektronik. Begitu juga dengan kebutuhan informasi dan hiburan sehingga masyarakat yang kurang meminati buku.
- Merubah pola pikir penanggung jawab kearsipan untuk lebih menyenangi keteraturan dokumen arsip.

a. Ekstern

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
2. Terbatasnya koleksi bahan pustaka;
3. Masih rendahnya kemampuan / penguasaan IT baik perpustakaan maupun kearsipan khususnya bagi petugas pengelola arsip/arsiparis maupun pustakawan;
4. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan;
5. Adanya SKPD yang belum melaksanakan pengelolaan arsip secara baku sesuai klasifikasi arsip;
6. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan (arsip masih dipandang sebelah mata).

b. Hambatan

1. Penempatan pustakawan, arsiparis / petugas pengelola arsip tidak sesuai tugas dan fungsi pokoknya;
2. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan (arsip masih dipandang sebelah mata);
3. Pelayanan perpustakaan terutama perpustakaan keliling belum optimal karena rendahnya minat dan budaya masyarakat;
4. Jumlah pustakawan dan arsiparis terbatas sehingga pembinaan ke desa belum optimal.

#### 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahkan dalam proses rancangan awal RKPD ada beberapa program yang belum dilaksanakan karena belum menjadi kebutuhan dan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan tujuan perangkat daerah yang akan dicapai sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana strategis dimana urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dalam mendukung visi kepala daerah "*Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*". berada pada misi "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh".

Sekaitan dengan pelayanan, usulan dari masyarakat juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang difasilitasi melalui Musyawarah Rencana Pembangunan dan pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama kegiatan yang diusulkan berkaitan dengan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat dan pengelolaan administrasi arsip daerah.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.

kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Peningkatan Kapasitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti dengan kebijakan renjana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Pelaksanaan Penerapan e-Arsip di tiap Unit Organisasi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas, serta dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu dengan Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan yang Berbasis Teknologi Informasi.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Renja tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mengangkat pelayanan Perpustakaan Digital karena di era digital saat ini orang-orang lebih dekat dengan gadget dari pada buku sehingga dengan Perpustakaan Digital ini mampu menempatkan buku yang ada pada perpustakaan di Internet/Gadget dan Perpustakaan Umum yang didukung dengan sarana dan prasarana yang menyenangkan bagi pemustaka.

Untuk bidang kearsipan, pengelolaan database arsip yang masih dilakukan secara manual akan dikelola dengan Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang dapat diintegrasikan dengan unit kearsipan di setiap perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar penataan, pengelolaan, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan

standar baku kearsipan dan pengelolaannya dapat dipantau melalui SIKD.

Dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh inspektorat yang masih menemukan adanya in konsistensi indikator kinerja dalam setiap laporan kinerja, maka kesekretariatan sebagai

pendukung layanan umum yang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah memastikan target kinerja terealisasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

#### Tujuan

1. Mewujudkan perpustakaan sebagai destinasi wisata baca
2. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

#### Sasaran

1. Meningkatnya literasi masyarakat
2. Meningkatnya arsip statis yang telah dibuatkan saran bantu temu balik  
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja
1. penyelenggaraan urusan perangkat daerah

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan yang disusun pada Renja tahun 2021 adalah tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pelayanan, pengembangan, dan menyelenggarakan perpustakaan dan pembinaan tata laksana kearsipan untuk mendukung visi kepala daerah pada misi mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat 5 (Lima) program, 15 kegiatan

dan 38 Sub Kegiatan untuk beberapa kelompok sasaran yaitu Lingkup Dinas DPK, masyarakat umum, pelajar, komunitas literasi, dan unit kearsipan perangkat daerah dan desa.

Tabel.3.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4,653,078,325			4,653,078,325				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,315,906,825			4,315,906,825				
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					90,135,727			90,135,727				
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	41,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	41,685,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,497,600
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,497,600
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	37,450,727	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,450,727
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,418,951,008			3,520,582,873				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang/bulan	100 %	3,393,551,008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,500,551,008
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan		100 %	18 Laporan	100 %	25,400,000		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,031,865

2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						21,010,200					25,000,000	
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah dokumen BMD yang teradministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, malili	100 %	4 Laporan	4 Laporan	21,010,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55,240,000					117,220,000	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terelaisasi		100 %	0	100 %	0		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,300,000
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terelaisasi		100 %	7 Orang	100 %	55,240,000		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	87,920,000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						265,716,315					297,791,800	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Paket)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	1 Paket	100 %	7,115,000		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	2 Paket	100 %	9,579,500		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,579,500
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (paket)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	1 Paket	100 %	7,900,300		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,900,300
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Dokumen)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	1 Dokumen	100 %	6,120,000		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,120,000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	4 Laporan	100 %	28,499,000		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	34,250,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Laporan)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	4 Laporan	100 %	206,502,515		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	229,942,000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						91,610,000					370,000,000	

2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi		100 %	0 Unit	100 %	0			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi		100 %	8 Unit	100 %	51,550,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,000
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi		100 %	4 Unit	100 %	40,060,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							269,983,575					382,382,235	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terealisasi		100 %	4 Laporan	100 %	6,941,575			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,382,235
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terealisasi		100 %	4 Laporan	100 %	125,042,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	138,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	123,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							103,260,000					125,510,000	

2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Dan dibayarkan pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin	100 %	6 Unit	100 %	61,450,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	63,650,000	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin	100 %	33 Unit	100 %	20,360,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,360,000	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin	100 %	2 Unit	100 %	21,450,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	41,500,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								337,171,500					842,849,975
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								205,900,000					422,849,975
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsiv gender	Jenis layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000(STM: information technology service management	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	100 %	2 Layanan	100 %	6,000,000			Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	0.05 Indeks	20,000,000	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	100 %	20 perpustakaan	100 %	16,000,000			Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	57,850,000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	100 %	3 Layanan	100 %	139,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	150,000,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	100 %	200 eksampilar	100 %	34,900,000			Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	174,999,975	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000			Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	20,000,000	

2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							131,271,500					420,000,000
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Lokus	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	50,000,000
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %	0 Perpustakaan	100 %	0		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	100,000,000
2	23	02	2.02	04	Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah orang yang mendapatkan Penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten kota	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %	24 Orang	100 %	100,271,500		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	220,000,000
2	23	02	2.02	03	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial	persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %	10 Perpustakaan	100 %	15,000,000		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	25,000,000
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta baca Tingkat daerah kabupaten/kota	persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang di pilih dan Didukung Kegiatannya	ersentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi		100 %	1 orang	100 %	16,000,000		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	25,000,000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							230,761,000			421,045,000	421,045,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							178,000,000			355,545,000	355,545,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							76,000,000			94,685,000	94,685,000	

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur menempatkan program, kegiatan serta sub kegiatan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota :
  - a. Perencanaan, perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - a.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - b.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - b.3 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
    - b.4 Evaluais kinerja perangkat daerah
  - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
    - b.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
    - c.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  - d. Administrasi umum perangkat daerah
    - d.1 Penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - d.2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - d.3 Penyediaan bahan logistik kantor
    - d.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - d.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - d.6 Fasilitas kunjungan tamu
    - d.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- e.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - e.2 Pengadaan mebel
  - e.3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    - f.1 Penyediaan jasa surat menyurat
    - f.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - f.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    - g.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan
      - dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - g.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    - g.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Pembinaan Perpustakaan
- a. Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
    - a.1 Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah
      - kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan
    - a.2 Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota
    - a.3 Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
  - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
    - b.1 Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum
      - yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
    - b.2 Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
    - b.3 Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
3. Program Pengelolaan Arsip
- a. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota

- a.1 Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
- b. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota
  - b.1 Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota
- 4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
  - a. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
    - a.1 Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun

Berikut tabel rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, dan Pendanaan Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 4.1

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4,811,728,325	259,160,000	0	0	5,070,888,325	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,349,321,825	171,410,000	0	0	4,520,731,825	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				104,645,727	0	0	0	104,645,727	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56,195,000	0	0	0	56,195,000	
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,000,000	0	0	0	6,000,000	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37,450,727	0	0	0	37,450,727	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,443,686,398	0	0	0	3,443,686,398	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,393,961,398	0	0	0	3,393,961,398	
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,725,000	0	0	0	49,725,000	
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,238,200	0	0	0	20,238,200	

2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan	Kab. Luwu Timur, malili, malili		4,800,000	171,410,000	0	0	176,210,000	
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,238,200	0	0	0	20,238,200	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55,240,000	0	0	0	55,240,000	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,240,000	0	0	0	55,240,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			258,298,500	0	0	0	258,298,500	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,840,000	0	0	0	10,840,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,579,500	0	0	0	9,579,500	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,350,000	0	0	0	10,350,000	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,120,000	0	0	0	6,120,000	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,075,000	0	0	0	21,075,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,334,000	0	0	0	200,334,000	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	55,410,000	0	0	55,410,000	

	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,800,000	116,000,000	0	0	120,800,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340,553,000	0	0	0	340,553,000
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,153,000	0	0	0	19,153,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		183,400,000	0	0	0	183,400,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138,000,000	0	0	0	138,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121,860,000	0	0	0	121,860,000
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,450,000	0	0	0	61,450,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,360,000	0	0	0	20,360,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,050,000	0	0	0	40,050,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				462,406,500	87,750,000	0	0	550,156,500
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				244,392,000	87,750,000	0	0	332,142,000
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,000,000	0	0	0	6,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,000,000	0	0	0	16,000,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		158,535,000	0	0	0	158,535,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Luwu Timur, Semua		40,740,000	87,750,000	0	0	128,490,000



2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,521,953	0	0	0	35,521,953
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			12,240,000	0	0	0	12,240,000
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			12,240,000	0	0	0	12,240,000
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,120,000	0	0	0	6,120,000
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,120,000	0	0	0	6,120,000

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menjadi prioritas pembangunan difokuskan kepada pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra dan mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja ( Renja ) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada Level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Malili, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



S A T R I, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199011 1 005